Frontier Agribisnis

Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa (JTAM)

OPEN ACCESS

e-ISSN 3048-1260

https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/fag

ANALISIS KLASIFIKASI KONFLIK DAN MANAJEMEN KONFLIK AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN DI KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR

Analysis of Conflict Classification and Management Due to Land Conversion in Gambut Sub-District, Banjar Regency

Dian Nugraha Ramadhan*, Mira Yulianti dan Luthfi

*Program Studi Agribisnis/Jurusan SEP, Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. A. Yani km.36, Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Kata Kunci
Klasifikasi Konflik; Konflik; Manajemen Konflik; Snowball Sampling.

Korespondensi
Corresponding author:
1910514210029@mhs.ulm.ac.id
mira.yulianti@ulm.ac.id
luthfi@ulm.ac.id

Diterima: 2 Oktober 2024
Disetujui: 23 Desember 2024 ,
Diterbitkan on-line : 30 Desember 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi dan manajemen konflik yang muncul akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Alih fungsi lahan menjadi penyebab berubahnya struktur kesempatan kerja dan pendapatan komunitas, hal ini dapat mendorong terjadinya sebuah konflik sosial. Berdasarkan teori T. Hani Handoko, konflik dibagi menjadi 5 tingkatan: (1) Konflik individu; (2) Konflik antar individu; (3) Konflik individu dengan kelompok; (4) Konflik antar kelompok; (5) Konflik antar organisasi. Manajemen konflik bertujuan untuk memberikan solusi bagi perbedaan pendapat ataupun kepentingan. Manajemen konflik menurut Thomas & Kilmann (1974) mencakup 5 metode: (1) Kompetisi; (2) Kolaborasi; (3) Kompromi; (4) Menghindar; (5) Mengakomodasi. Penelitian dilakukan pada Juli-Agustus menggunakan metode *snowball sampling*, dengan data primer dan sekunder. Hasil menunjukkan bahwa konflik jarang terjadi, dengan rata-rata skor 1,62. Kultur kekeluargaan kuat menjadi faktor utama, meskipun beberapa konflik muncul akibat gangguan ekologi seperti hama dan penyempitan sungai. Manajemen konflik umumnya menggunakan gaya kolaborasi (rata-rata skor 2,34), dengan penyelesaian melalui diskusi dalam forum masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yang artinya Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 12,40% terhadap perekonomian. Selain itu, sektor pertanian juga. memberikan peran strategis dengan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 28,61% (BPS Indonesia, 2023).

Kabupaten Banjar dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Kalimantan Selatan. Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021, kawasan pertanian pangan berkelanjutan mencakup luas sekitar 42.006 hektare. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur tata ruang wilayah Kabupaten Banjar tahun 2021-2041. Peraturan ini juga berfokus pada sektor pertanian yang tujuannya adalah melindungi lahan pertanian guna menjaga keseimbangan ekosistem serta mengembangkan

sektor pertanian menuju konsep agropolitan. Namun, laju pengurangan lahan pertanian di Kabupaten Banjar lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 575.115 jiwa.

Kecamatan Gambut merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banjar yang menjadi perhatian pemerintah sebagai penghasil pangan, khususnya padi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa Kabupaten Banjar sebagai sentra agraris terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan harus menjamin ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian yang subur sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Namun, hal ini tidak menghindarkan Kecamatan Gambut dari alih fungsi lahan. Menurut data BPS Kalsel (2023).

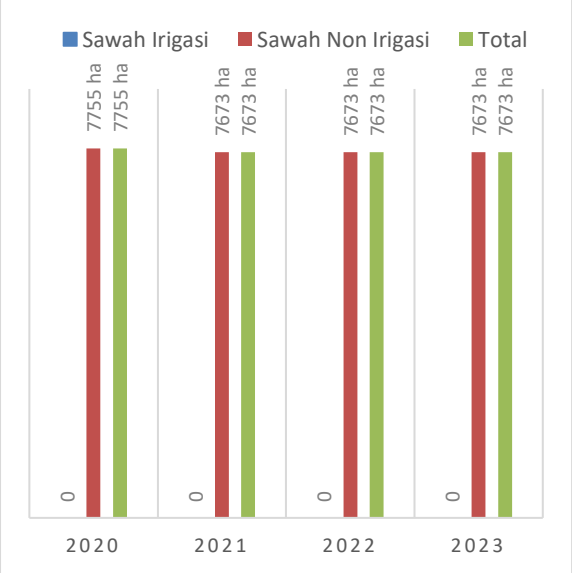

Gambar 1. Histogram Pengurangan Luas Lahan Sawah (BPS, 2024)

Antara tahun 2018 dan 2019, lahan sawah di Kecamatan Gambut berkurang sebanyak 1.021 hektare. Namun, terjadi peningkatan luas lahan persawahan sebesar 234 hektare pada periode 2019 hingga 2020, sebelum pengurangan kembali terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar 82 hektare. Urbanisasi yang tinggi menjadi faktor utama konversi lahan di daerah ini. Kecamatan Gambut, yang terletak di Kabupaten Banjar, menjadi salah satu wilayah yang mengalami perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

Pengurangan luas sawah ini berdampak pada penurunan produksi padi dan berkurangnya efektivitas investasi pemerintah dalam pengairan pertanian. Sejak 2008, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp. 3 miliar untuk pembangunan pasar besar di Kecamatan Gambut, yang mengarah pada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi lokal Mahyudi, (2016). Setyawan, (2023), mencatat bahwa alih fungsi lahan di Gambut membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya termasuk perkembangan wilayah pertokoan, perumahan, dan pergudangan yang mendorong kawasan ini menjadi Wilayah Peri Urban (WPU). Namun, dampak negatifnya adalah berkurangnya lahan pertanian yang sebelumnya merupakan kawasan pangan berkelanjutan, yang kini beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian akibat urbanisasi dan pembangunan infrastruktur.

Alih fungsi lahan di Kecamatan Gambut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah yang mendorong penjualan lahan pertanian. Petani yang bergantung pada hasil panen merasa dirugikan, terutama ketika hasil panen gagal. Perubahan lahan menjadi non-pertanian juga berdampak pada lingkungan, dengan terhambatnya aliran air karena pembangunan perumahan dan limbah rumah tangga. Selain itu, alih fungsi lahan menyebabkan perubahan dalam kesempatan kerja, pendapatan, serta pergeseran dari budaya agraris ke urban, yang juga berdampak pada meningkatnya kriminalitas dan menurunnya *net social benefit* (Azhar, 2021).

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani melalui berbagai upaya, termasuk investasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja pertanian. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, ilmu pengetahuan, serta teknologi juga penting. Penataan dan pengembangan kelembagaan pedesaan menjadi aspek krusial dalam mencapai tujuan ini pembangunan pertanian yang komprehensif dapat menciptakan perubahan signifikan dalam kesejahteraan petani dan pembangunan desa secara keseluruhan. Fatah (2007)
Perubahan fungsi lahan di Kecamatan Gambut menyebabkan dampak signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian besar petani sangat bergantung pada

hasil pertanian dan tidak memiliki pekerjaan alternatif. Akibatnya, alih fungsi lahan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan, yang memicu potensi konflik sosial. Ketimpangan pendapatan antara petani lokal dan pendatang yang bekerja di sektor non-pertanian meningkatkan kecemburuan sosial dan kriminalitas. Handoko (2002), mengidentifikasi lima tingkatan konflik, yaitu: (1) konflik dalam diri individu, (2) konflik antar individu dalam organisasi, (3) konflik antara individu dan kelompok, (4) konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan (5) konflik antar organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial akibat alih fungsi lahan dapat memperburuk ketegangan dalam masyarakat.

Manajemen konflik dibutuhkan untuk meredam potensi ketegangan ini. Fisher (2000), menyatakan bahwa manajemen konflik bertujuan mengembangkan alternatif pendekatan untuk mencegah kekerasan dan mendorong perubahan perilaku positif. Berdasarkan teori manajemen konflik Thomas & Kilmann (1974) metode dibagi menjadi 5 yaitu: (1) Kompetisi; (2) Kolaborasi; (3) Kompromi; (4) Menghindar; dan (5) Mengakomodasi. Oleh karena itu maka penelitian mengenai analisis klasifikasi konflik dan manajemen konflik akibat alih di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ini dilakukan.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis dan mengklasifikasi konflik yang muncul akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kecamatan Gambut; (2) Menganalisis dan mengklasifikasi upaya manajemen konflik untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian antara petani padi dengan pihak yang terkait di Kecamatan Gambut.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penelitian ini memberikan saran dan pertimbangan untuk strategi penanganan konflik sosial yang lebih efektif di masa depan; (2) Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan keterampilan serta memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi; (3) Bagi pembaca, penelitian ini menambah wawasan dan referensi terkait manajemen konflik akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap solusi kebijakan dan praktik di lapangan.

METODE

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Desa tempat penelitian adalah Guntung Papuyu, Tambak Sirang Laut, Tambak Sirang Darat, dan Malintang. Berlangsung dari bulan Februari sampai Agustus 2024 dimulai tahap perencanaan, penelitian, pengumpulan data hingga dengan penulisan laporan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara menggunakan kuesioner dan observasi secara langsung kepada petani yang datanya didapatkan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Gambut. Data sekunder didapatkan dari sumber kedua yaitu dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, serta sumber lain dari jurnal maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit seiring proses pengambilan data menjadi lebih besar. Pencarian data dan informasi akan berhenti apabila tambahan tambahan informasi tidak lagi menghasilkan pengetahuan baru atau informasi yang didapatkan sudah berada di titik jenuh.

Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah: pertama, mengenai klasifikasi konflik akibat alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian; dan kedua, terkait upaya manajemen konflik yang muncul dari alih fungsi lahan tersebut. Data diperoleh melalui wawancara dengan petani, kemudian direduksi dengan memilih informasi yang relevan untuk menjawab kedua rumusan masalah. Hasil wawancara selanjutnya dihitung menggunakan rumus persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang terletak 14 km dari Kota Banjarmasin, dengan Pasar Gambut sebagai penanda Km 14. Wilayah ini merupakan tanah peralihan antara rawa Banjarmasin dan perbukitan Banjarbaru, dengan potensi pertanian yang signifikan. Kecamatan Gambut memiliki luas 12.930 hektare dan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar, Kota Banjarbaru, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Aluh-Aluh.

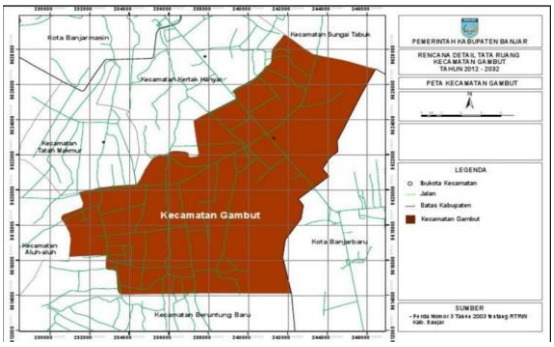

Gambar 2. Peta Wilayah Kecamatan Gambut (BPS Kec. Gambut, 2019)

Karakteristik Responden

Usia. Usia mempengaruhi kemampuan dalam menghadapi konflik, terutama dalam pertanian. Pengalaman bertambah seiring usia, membantu individu lebih matang dalam menyelesaikan masalah agraria. Sementara itu, kelompok muda cenderung lebih inovatif dan terbuka terhadap perubahan.

Tabel 1. Kelompok Usia Responden

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	30 – 40	1	4,17
2	41 – 60	21	87,5
3	>60	2	8,33
Total		24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 1, responden terbanyak berada di kelompok umur 41-60 tahun, yaitu sebanyak 21 orang atau 87,5% dari jumlah keseluruhan sampel penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif, yaitu usia yang tidak di bawah 15 tahun dan tidak lebih dari 64 tahun. Kelompok umur ini mencakup individu yang berada dalam tahap kehidupan aktif dan berkontribusi dalam sektor sosial maupun ekonomi, serta memiliki pengalaman yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Pendidikan. Pendidikan adalah proses formal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masalah. Tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk cara berpikir dan kemampuan menghadapi konflik. Tingkat pendidikan responden penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	1	4,17
2	SD/Sederajat	2	8,33
3	SLTP/Sederajat	8	33,33
4	SLTA/Sederajat	8	33,33
5	Sarjana	5	20,83
	Total	24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir di tingkat SLTA dan SLTP, masing-masing sebanyak 16 orang dengan persentase 33,33 persen. Sebanyak 5 responden memiliki pendidikan di jenjang sarjana dengan persentase 20,83 persen. Tingkat pendidikan ini mencerminkan kemampuan responden dalam beradaptasi, menyelesaikan masalah, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara keseluruhan, pendidikan responden tergolong baik, dengan mayoritas menyelesaikan jenjang SLTA dan perguruan tinggi.

Pekerjaan. Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berkontribusi pada masyarakat. Melalui pekerjaan, seseorang dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan praktis yang akan berpengaruh pada cara mereka mengatasi konflik. Pengalaman kerja memungkinkan individu untuk lebih siap menghadapi tantangan

dan perbedaan pendapat, karena mereka lebih terbiasa dengan berbagai situasi dan solusi yang diperlukan. Jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3. Pekerjaan Responden

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Petani	18	75
2	PNS/ASN	4	16,67
3	Wirausaha	2	8,33
Total		24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar responden (75%) berprofesi sebagai petani, dengan banyak yang melanjutkan pekerjaan orang tua mereka. Beberapa petani menyewa lahan di lokasi strategis yang rentan terhadap alih fungsi lahan. Selain petani, terdapat 4 responden (16,67%) yang bekerja sebagai ASN/PNS, khususnya sebagai penyuluh pertanian. Keberadaan penyuluh ini sangat penting dalam memberikan informasi teknis dan mendukung pengembangan pertanian. Dengan dominasi profesi petani, responden memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengelola lahan dan mengatasi tantangan agraria serta konflik sosial.

Klasifikasi Konflik Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kecamatan Gambut

Konflik di Kecamatan Gambut meskipun jarang terjadi, sering kali dipicu oleh perbedaan batas lahan, alih fungsi lahan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Isu-isu ini dapat memengaruhi hubungan sosial antara petani dan mengancam keberlanjutan sektor pertanian. Melalui observasi dan wawancara mendalam, penyebab konflik dapat dianalisis lebih rinci untuk memahami akar masalahnya. Hasil dari analisis ini dapat membantu merancang solusi yang efektif untuk mempertahankan keharmonisan antar kelompok tani serta menjaga kelangsungan pertanian yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut.

Konflik Antar Individu

Berikut adalah tabel yang menunjukkan konflik antar individu di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 4. Klasifikasi Konflik Antar Individu

No	Keterangan	Konflik Pertahun	Jumlah Responden	
			Orang	Persentase
1	Sangat Jarang	1	15	62.5
2	Jarang	2	7	29,16
3	Sedang	3	2	8,33
4	Sering	4		
5	Sangat Sering	5		
Total			24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 4, mayoritas responden (62,5%) mengindikasikan bahwa konflik antar individu sangat jarang terjadi, yang menunjukkan adanya ketegangan yang relatif rendah di kalangan petani. Meskipun konflik jarang muncul, masalah yang sering terjadi berkaitan dengan ketidakjelasan batas tanah saat panen, yang memicu perselisihan antar petani. Ketidakpuasan dalam pembagian hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan juga menjadi sumber ketegangan, karena petani merasa bahwa bagi hasil yang diterima tidak adil dan tidak merata, memperburuk hubungan antar mereka.

Konflik Individu Dengan Kelompok

Berikut adalah tabel yang menunjukkan konflik antar individu di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 5. Klasifikasi Konflik Antar Individu

No	Keterangan	Konflik Pertahun	Jumlah Responden	
			Orang	Persentase
1	Sangat Jarang	1	12	50
2	Jarang	2	7	29.16
3	Sedang	3	4	16.66
4	Sering	4	1	4.16
5	Sangat Sering	5		
Total			24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 5, 50% responden memilih pernyataan pertama yang menunjukkan bahwa

konflik antar petani sering dipicu oleh ketidakadilan dalam pembagian bantuan pemerintah, seperti pupuk, bibit, dan alsintan. Sebanyak 29,16% responden memilih pernyataan kedua, sementara 16,66% memilih pernyataan ketiga, dan 4,16% pernyataan keempat. Ketidakadilan dalam distribusi bantuan ini mengganggu keharmonisan antar petani, menciptakan rasa iri, dan meningkatkan potensi konflik sosial. Hal ini menghambat kerjasama yang seharusnya mendukung kelancaran kegiatan pertanian, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian serta merusak hubungan sosial dalam kelompok tani.

Konflik Kelompok Dengan Kelompok

Berikut adalah tabel yang menunjukkan kelompok degan kelompok di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 6. Klasifikasi Konflik Kelompok Dengan Kelompok

No	Keterangan	Konflik Pertahun	Jumlah Responden	
			Orang	Persentase
1	Sangat Jarang	1	14	58,33
2	Jarang	2	6	25
3	Sedang	3	4	12,5
4	Sering	4	1	4,16
5	Sangat Sering	5		
Total			24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 6, mayoritas responden (58,33%) menganggap konflik antar kelompok sangat jarang terjadi. Konflik antar kelompok sering dipicu oleh perebutan sumber daya, terutama distribusi bantuan pemerintah yang dianggap tidak merata, seperti pupuk dan alsintan. Sebanyak 25% responden menyebutkan adanya konflik sosial terkait ketidakadilan distribusi, sementara 12,5% lainnya memilih pernyataan tentang jabatan ganda ketua kelompok tani yang juga aparat desa. Jabatan ganda ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pembagian bantuan, yang dapat memperburuk hubungan antar kelompok tani dan memicu ketegangan sosial. Hal ini menandakan bahwa masalah pembagian sumber daya dan ketidakadilan dalam pengelolaan bantuan memiliki dampak besar terhadap keharmonisan kelompok tani di Kecamatan Gambut.

Konflik Antar Organisasi

Berikut adalah tabel yang menunjukkan kelompok degan kelompok di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 7. Klasifikasi Konflik Antar Organisasi

No	Keterangan	Konflik Pertahun	Jumlah Responden	
			Orang	Persentase
1	Sangat Jarang	1	12	50
2	Jarang	2	8	33.33
3	Sedang	3	4	16,16
4	Sering	4		
5	Sangat Sering	5		
Total			24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 7, mayoritas responden (50%) memilih pernyataan pertama, yang menunjukkan bahwa konflik antar petani jarang terjadi di Desa Guntung Papuyu dan Tambak Sirang Darat. Namun, di Desa Malintang dan Tambak Sirang Laut, konflik lebih sering ditemukan. Konflik ini umumnya terkait dengan kebijakan pembangunan yang diatur oleh Perda No. 24 Tahun 2021. Perda tersebut memungkinkan pemanfaatan lahan pertanian hingga 500 meter dari jalan utama untuk dijadikan kawasan permukiman. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani, terutama yang hanya menyewa lahan, karena mereka merasa kehilangan kontrol atas perubahan fungsi lahan mereka menjadi kawasan non-pertanian. Akibatnya, muncul ketegangan yang memperburuk hubungan antara petani dan pihak terkait dalam pembangunan, memicu konflik sosial yang lebih besar.

Analisis Klasifikasi Konflik

Tabel berikut menyajikan analisis data konflik yang terjadi di kalangan petani di Kecamatan Gambut. Data ini mencakup berbagai jenis konflik yang ditemukan, faktor penyebab yang memicu ketegangan, serta frekuensi kejadian konflik yang tercatat di masing-masing desa di wilayah penelitian. Analisis ini membantu memahami dinamika sosial-ekonomi yang berkontribusi pada timbulnya konflik, serta memberikan wawasan yang lebih baik untuk

merancang solusi yang efektif dan menjaga kesejahteraan petani di kawasan tersebut.

Tabel 8. Tabel Analisis Klasifikasi Konflik

No	Variabel	Skor					Total	Rata-rata
		1	2	3	4	5		
1	X1.1	(15)x1=15	(7)x2=14	(2)x3=6			35	1.46
2	X1.2	(12)x1=12	(7)x2=14	(4)x3=12	(1)x4=4		42	1.75
3	X1.3	(14)x1=14	(6)x=12	(3)x3=9	(1)x4=4		39	1.62
4	X1.4	(12)x1=12	(8)x2=16	(4)x3=12			40	1.66
				Total			156	1.62

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 8, rata-rata jawaban menunjukkan bahwa konflik akibat alih fungsi lahan sangat jarang terjadi, dengan skor 1,62. Konflik antar kelompok tani mencatatkan rata-rata tertinggi (1,75), yang umumnya disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian bantuan pemerintah seperti pupuk dan alsintan. Konflik antar individu memiliki rata-rata terendah (1,46), sering kali dipicu oleh ketidakjelasan batas tanah yang mengakibatkan tumpang tindih lahan antar petani. Selain itu, ketidakpuasan dalam pembagian hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan juga menjadi salah satu pemicu konflik, karena dianggap tidak adil bagi petani yang merasa dirugikan.

Manajemen Konflik Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kecamatan Gambut

Manajemen konflik adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi konflik dalam organisasi dengan cara yang efektif. Menurut Thomas & Kilmann, manajemen konflik terdiri dari lima tahap utama: pengenalan, analisis, pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Tahap pertama melibatkan pengenalan sumber konflik yang bisa berupa perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, atau ketidakseimbangan distribusi sumber daya. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk memahami akar masalah, diikuti dengan penyusunan solusi yang tepat, implementasi, dan evaluasi untuk memastikan efektivitas solusi, mengurangi dampak negatif, serta mencapai hasil yang konstruktif.

Manajemen Konflik Antar Individu

Berikut adalah tabel yang menunjukan manajemen konflik antar individu di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 9. Manajemen Konflik Antar Individu

No	Keterangan	Skor	Jumlah Responden	
			Orang	Persentase
1	Kompetisi			1
2	Kolaborasi	11	45,83	2
3	Kompromi	13	54,16	3
4	Menghindar			4
5	Mengakomodasi			5
	Total		24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 9, penyelesaian konflik lebih sering dilakukan melalui kompromi dan kolaborasi. Kompromi menjadi metode yang paling banyak dipilih, dengan 13 dari 24 responden (54,17%) memilih opsi ini. Kolaborasi dipilih oleh 11 responden, yang mewakili 45,83% dari total responden. Manajemen konflik biasanya dilakukan melalui diskusi tatap muka antar petani, di mana sesi dengar pendapat sering kali efektif dalam menyelesaikan konflik individu. Diskusi ini memungkinkan petani untuk saling memahami pandangan masing-masing, yang pada gilirannya dapat menghindari terjadinya perang dingin atau ketegangan yang berkepanjangan di antara mereka. Pendekatan ini juga membantu mempertahankan keharmonisan dalam kelompok tani.

Manajemen Konflik Individu Dengan Kelompok

Berikut adalah tabel yang menunjukan manajemen konflik individu dengan kelompok di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 10. Manajemen Konflik Individu Dengan Kelompok

No	Keterangan	Skor	Jumlah Responden	
			Orang	Persentase
1	Kompetisi			1
2	Kolaborasi	11	45,83	2
3	Kompromi	13	54,16	3
4	Menghindar			4
5	Mengakomodasi			5
	Total		24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 10, sebagian besar responden (75%) memilih untuk menyelesaikan konflik melalui kolaborasi dan kompromi. Forum diskusi sering digunakan untuk membahas berbagai isu yang muncul antar petani, memungkinkan mereka untuk saling berbagi pandangan dan mencari solusi bersama. Kompromi dilakukan dengan cara pembagian pupuk subsidi yang merata dan penjadwalan penggunaan alsintan secara adil. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar kelompok tani dan mencegah konflik berkembang lebih jauh yang dapat merusak hubungan sosial. Dengan demikian, harmonisasi antar petani tetap terjaga, mendukung kerjasama, dan menjaga produktivitas pertanian yang berkelanjutan di masyarakat.

Manajemen Konflik Kelompok Dengan Kelompok

Berikut adalah tabel yang menunjukan manajemen konflik kelompok dengan kelompok di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 11. Manajemen Konflik Kelompok Dengan Kelompok

No	Keterangan	Skor	Jumlah Responden	
			Orang	Persentase
1	Kompetisi	1		
2	Kolaborasi	2	24	
3	Kompromi	3		
4	Menghindar	4		
5	Mengakomodasi	5		
	Total		24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 11, seluruh responden, yakni 24 orang atau 100% dari total, memilih kolaborasi sebagai metode penyelesaian konflik. Konflik diselesaikan melalui forum diskusi karena permasalahan yang dihadapi bersifat massal dan berdampak pada semua petani di Kecamatan Gambut. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bekerja sama dengan petani untuk mencari solusi bersama, dengan proses dengar pendapat dianggap sebagai jalan tengah paling logis. Budaya kekeluargaan dan gotong royong yang masih kuat memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan ide mereka secara terbuka, menciptakan penyelesaian yang adil, memuaskan, dan efektif, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Manajemen Konflik Antar Organisasi

Berikut adalah tabel yang menunjukan manajemen konflik kelompok dengan kelompok di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 12. Manajemen Konflik Antar Organisasi

No	Keterangan	Skor	Jumlah Responden	
			Orang	Persentase
1	Kompetisi	1		
2	Kolaborasi	2	10	58,33
3	Kompromi	3	14	41,66
4	Menghindar	4		
5	Mengakomodasi	5		
	Total		24	100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 12, penyelesaian konflik didominasi oleh pendekatan Kompromi dan Kolaborasi. Sebanyak 58,33% responden memilih pernyataan kedua, sedangkan 41,66% memilih pernyataan ketiga. Konflik diselesaikan melalui diskusi forum yang melibatkan semua pihak terkait, dengan solusi berupa pemberian ganti rugi atau bantuan kepada petani terdampak. Pendekatan ini dianggap efektif dalam mengurangi ketegangan dan menciptakan kesepakatan bersama.

Analisis Manajemen Konflik

Berikut adalah tabel yang menunjukan manajemen konflik antar organisasi di kalangan petani di Kecamatan Gambut:

Tabel 13. Tabel Rekapitulasi Jawaban Klasifikasi Konflik

No	Variabel	Skor					Total	Rata-rata
		1	2	3	4	5		
1	X2.1		(11)x2=22	(13)x3=39			61	2.54
2	X2.2		(18)x2=36	(6)x3=18			54	2.25
3	X2.3		(24)x2=48				48	2
4	X2.4		(10)x2=20	(14)x3=42			62	2.58
			Total				225	2.34

Sumber: Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan tabel 11, rekapitulasi jawaban menunjukkan bahwa manajemen konflik akibat alih fungsi lahan cenderung dilakukan dengan gaya manajemen kolaborasi, dengan rata-rata

jawaban sebesar 2,07. Pendekatan kolaboratif ini dipengaruhi oleh kuatnya kultur kekeluargaan dalam masyarakat, di mana penyelesaian konflik melalui diskusi forum menjadi metode yang umum diterapkan. Konflik antar organisasi dengan kelompok mencatatkan rata-rata jawaban tertinggi sebesar 2,58, di mana penyelesaian konflik sering dilakukan dengan gaya manajemen kompromi yang melibatkan proses *take and give* untuk meredakan ketegangan. Sebaliknya, rata-rata jawaban terendah ditemukan pada manajemen konflik antar kelompok, dengan nilai rata-rata 2, yang menunjukkan bahwa gaya kolaborasi diutamakan untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi konflik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Klasifikasi konflik akibat alih fungsi lahan di Kecamatan Gambut tergolong sangat jarang terjadi. Konflik antar individu dengan kelompok menjadi konflik yang memiliki frekuensi paling banyak terjadi. Sebaliknya, konflik antar individu dengan individu menjadi konflik yang paling jarang terjadi.
2. Manajemen konflik di Kecamatan Gambut lebih berfokus pada gaya kolaborasi dan kompromi. Kultur masyarakat yang kuat menjadi alasan utama pendekatan ini efektif. Diskusi sering kali digunakan sebagai solusi, sementara kompromi dengan pendekatan take and give juga sering diterapkan. Hal ini dilakukan karena petani merasa mengalami kerugian, meskipun terkadang solusi atau bantuan yang diberikan dianggap belum memadai.

Saran

1. Untuk mengatasi isu sosial dan mengurangi potensi konflik, perlu adanya penguatan kelembagaan petani. Selain itu, perlunya mendorong partisipatif aktif dalam kelompok tani serta meningkatkan solidaritas antar petani dapat membantu mengatasi rasa iri dan meningkatkan kerjasama dalam menghadapi tantangan bersama.
2. Adanya peninjauan ulang terkait kebijakan daerah terkait alih fungsi lahan untuk memastikan alih fungsi lahan tidak merugikan sektor pertanian.
3. Memastikan penetapan batasan yang jelas dan ketat terhadap alih fungsi lahan. Pemberian intensif atau bantuan bagi petani yang masih menjaga lahannya tetap produktif agar pembangunan tetap terkontrol.
4. Memberikan edukasi kepada para petani mengenai manfaat jangka panjang pertanian terhadap dampak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, M. S. (2021). *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Petani Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar* [Thesis, Universitas Lambung Mangkurat]. Universitas Lambung Mangkurat Repostitory

BPS Indonesia. (2023). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023*.

BPS Kalsel. (2023). *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2023*.

BPS Kec. Gambut. (2019). *Kecamatan Gambut Dalam Angka 2019*.

Fatah, L. (2007). *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan* (Ed. 2). Pustaka Banua.

Fisher. (2000). *Sources of Conflict and Methods of Conflict Eesolution. International Peace and Conflict Resolution School of International Service.* The American University.

Handoko, T. H. (2002). *Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia* (Edisi II). Penerbit Salemba Empat.

Mahyudi, F. (2016). Upaya Peningkatan Produktivitas Padi Lokal Siam Unus Melalui Pendekatan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu. *Media Sains*.

Setyawan, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Terhadap Alih Fungsinya Yang Terjadi Di Kecamatan Gambut (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar)*. [Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat]. Universitas Lambung Mangkurat Repository.

Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. XICOM.